



DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP-NAG) PERUBAHAN
T.A. 2020**

NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Kecamatan Airpura

Kabupaten Pesisir Selatan

Propinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Alamat: NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Nagari Lalang Panjang Inderapura.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparaturnya pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Pakan Salasa , 2020
Tim Penyusun,



Maifitri Heppi. S.IP



**WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) PERUBAHAN
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 pengganti PP 47 tahun 2016 pengganti 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 Tentang Skala Prioritas Penggunaan dana Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) PERUBAHAN
TAHUN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2020
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Nagari
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Tahun 2020

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2019 Nomor

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PERUBAHAN NAGARI TAHUN 2020

BAMUS NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA



JAFRIL

Diundangkan di Nagari Lalang Panjang Inderapura
Pada Tanggal 2020
Sekretaris Nagari

MAIFITRI HEPPL, SIP

Ditetapkan di Lalang Panjang Inderapura
Pada tanggal 2020
WALI NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Perubahan Nagari

Mekanisme penyusunan RKP PERUBAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Perubahan Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Perubahan Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Perubahan Nagari.

3. Tim Penyusun RKP Perubahan Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Perubahan Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Perubahan Nagari menyusun Rancangan RKP Perubahan Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Perubahan Nagari. Tim penyusun RKP Perubahan Nagari menyampaikan berita acara kepada Wali Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Perubahan Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Perubahan Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Perubahan Nagari.
6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Perubahan Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Perubahan Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Perubahan Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Perubahan Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Perubahan Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Perubahan Nagari.

B. Visi dan Misi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi.

VISI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA seperti Pemerintahan Nagari, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Airpura mempunyai titik berat sektor infrastruktur.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA adalah

“Agar segenap warga NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun di masa mendatang tercetuslah sebuah semboyan “ Terwujudnya Nagari Lalang Panjang Sebagai Nagari Yang Mandiri Bersatu Dalam Mensejahterakan Masyarakat “

MISI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada diatas Misi ,pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan /dikerjakan sebagaimana penyusunan visi ,misipun dalam penyusunanya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA adalah :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta Pemahaman dan Pengamalan Norma-norma agama dan adat istiadat.
3. Mengelola Keuangan Nagari secara transparan,tertib dan disiplin yang dipertanggungjawabkan .
4. Menciptakan system penyelenggaraan pemerintah yang baik,bersih dan transparan , dimulai dari perangkat ditingkat nagari sampai ke tingkat kampung
5. Terciptanya nagari lalang panjang yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan

1.2 Landasan Hukum

RKP PERUBAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURATahun 2020 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Perubahan Nagari Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP PERUBAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tahun 2019

Tujuan dari penyusunan RKP PERUBAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2012 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2019

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan RKP PERUBAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari
3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2018 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.256.157.800,00

1. Pendapatan asli nagari
 - Hasil usaha nagari Rp. 0,-
 - Hasil kekayaan nagari Rp. 3.600.000,00
 - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Rp.0,-
 - Lain-lain pendapatan nagari yang sah Rp. 2.700.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp.
 - Alokasi dana desa Rp. 422.242.200,00
 - Dana Desa Rp. 793.760.000,00
 - Bagi Hasil Pajak/Restribusi kabupaten Rp. 25.579.500,00
 - Bagi Hasil Restribusi Rp. 8.276.100,00
3. Bantuan keuangan perintah provinsi Rp. 0,-
4. Bantuan Pemerintah Kabupaten Rp. 0,-

2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannnya kembali oleh naggari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Uraian Jumlah (Rp)

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 443.262.205,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 688.570.660,00
- Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 22.500.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 62.025.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp. 3.000.000,00

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB III
EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Perubahan Nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan RKP Perubahan Nagari Tahun 2019 dalam bidang

- 1. Pembangunan yang didanai oleh alokasi dana desa
- 2. pembangunan yang di danai oleh dana desa terlaksana 99%
- 3. pemberdayaan yang di danai oleh dana desa terlaksana 93 %
- 4. pembinaan yang didanai oleh alokasi dana desa terlaksana 95 %

3.1.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

- 1. penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di danai oleh alokasi dana desa terlaksana 97%

Tabel 1.1

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2019

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	43.200.000,-	ADD	1 Tahun	43.200.000,-	ADD
2	Siltap Perangkat dan Tunjangan	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	219.000.000,-	ADD	1 Tahun	219.000.000,-	ADD
3.	Jaminan Sosial bagi Perangkat Nagari	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	10.035.000,-	ADD	1 Tahun	8.661.000,-	ADD
4.	Honor PPKN dan OP Nagari	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	64.500.000,-	ADD	1 Tahun	61.849.880,-	ADD
5.	Tujangan Bamus	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	58.200.000,-	ADD	1 Tahun	58.200.000,-	ADD

6.	OP Bamus	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	15.000.000,-	ADD	1 Tahun	15.000.000,-	ADD
7.	OP Rasra Atau Raskin	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	2.136.000,-	ADD	1 Tahun	0,-	ADD
8.	Insentife PBB	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	3.126.467,17	ADD	1 Tahun	2.136.000,-	ADD
9.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	32.416.136,92	ADD	1 Tahun	22.045.325,-	ADD
10.	Honor Register Nagari (Seknag)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	1.800.000,-	ADD	1 Tahun	1.800.000,-	ADD
11.	IDM Nagari	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	300.000,-	ADD	1 Tahun	300.000,-	ADD
12.	Pembahasan APB	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	1.902.500,-	ADD	1 Tahun	1.870.000,-	ADD
13.	RKP/RPJM	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	3.287.500,-	ADD	1 Tahun	4.365.500,-	ADD
14.	Musnag/Musre mbang	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	5.662.500,-	ADD	1 Tahun	5.662.500,-	ADD
15.	Penyelenggaraa n Lomba Nagari	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	8.000.000,-	ADD	1 Tahun	3.000.000,-	ADD

3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa yang didanai oleh dana desa terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antra lain

Tabel 1.2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan nagari Tahun 2019

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraa n Paud/TPA	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	72.000.000,-		1 Tahun	72.000.000,-	DD
2.	Dukungan Penyelenggaraa n PAUD (APE)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	2.400.000,-	DD	1 Tahun	2.400.000,-	DD
3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	6.425.000,-	DD	1 Tahun	6.215.000,-	DD
4.	Peningkatan Taman Bacaan	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	18.162.650,-	DD	1 Tahun	14.776.900,-	DD
5.	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	4.400.000,-	DD	1 Tahun	4.400.000,-	DD
6.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni (Pelatihan Pepatah Petitih Adat)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	7.612.500,-	DD	1 Tahun	4.162.500,-	DD
7.	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin (Beasiswa RTM)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	18.275.000,-	DD	1 Tahun	18.150.000,-	DD
8.	Honor Kader Dasawisma	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	5.460.000,-	DD	1 Tahun	5.460.000,-	DD

Nagari Lalang Panjang Inderapura

9.	Penyelenggaraa n Posyandu	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	26.218.239,46	DD	1 Tahun	26.048.000,-	DD
10.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	5.957.500,-	DD	1 Tahun	5.957.500,-	DD
11.	Pembangunan Gedung Posyandu	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	18.665.600,-	DD	1 Tahun	18.665.600,-	DD
12.	Pembangunan Jembatan Mini	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	145.307.202,59	DD	1 Tahun	139.140.200,-	DD
13.	Peningkatan Lapangan Bola Kaki	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	120.301.850,-	DD	1 Tahun	92.518.420,-	DD
14.	Pembangunan RTLH	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	50.000.000,-	DD	1 Tahun	48.930.600,-	DD
15.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Sepeda Motor)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	30.205.321,-	DD	1 Tahun	25.700.000,-	DD
16.	Pemeliharaan Taman	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	3.500.000,-	DD	1 Tahun	3.500.000,-	DD
17.	Pembangunan MCK	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	152.999.900,-	DD	1 Tahun	144.984.540,-	DD
18.	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	3.427.500,-	DD	1 Tahun	3.015.000,-	DD
19.	Pengadaan Plank Asmaul Husna	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	42.101.050,-	DD	1 Tahun	42.010.000,-	DD
20.	Pembuatan Plank Besi dan Baliho	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	6.730.150,-	DD	1 Tahun	6.730.000,-	DD

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 1.3

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggara an Festival HUT RI	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	6.650.000,-	PBH	1 Tahun	2.000.000,-	PBH
2.	Kegiatan Liga Desa	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	10.000.000,-	DD	1 Tahun	10.000.000,-	DD
3.	Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	2.500.000,-	DD	1 Tahun	2.500.000,-	DD
4	Operasional PKK	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	19.125.000,-	ADD	1 Tahun	8.000.000,-	ADD

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang pemberdayaan yang didanai oleh dana desa terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

Tabel 1.4

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2019

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Platihan Bamus dan Anggota	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	1.300.000,-	PBH	1 Tahun	1.300.000,-	PBH
2.	Kegiatan Pokja 1	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	21.000.000,-	DD	1 Tahun	21.000.000,-	DD
3.	Kegiatan Pondok Al-Quran	Lalang Panjang Inderapura	1 Tahun	3.000.000,-	DD	1 Tahun	3.000.000,-	DD
4.	Peningkatan Kapasitas	Lalang Panjang	1 Tahun	40.940.000,-	DD	1 Tahun	36.725.000,-	DD

Nagari Lalang Panjang Inderapura

	Operator Desa	Inderapura						
--	---------------	------------	--	--	--	--	--	--

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan peraturan nagari nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

3.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa

- Pemenuhan Penghasilan tetap Pemerintah nagari
- Pemenuhan Tunjangan wali nagari dan perangkat nagari
- Pemenuhan Operasional Pemerintah Nagari
- Pemenuhan tunjangan kehormatan bamus nagari
- Pemenuhan Operasional Bamus Nagari
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah nagari
- Operasional pemungutan PBB-P2
- Operasional Rastra
- Validasi Profil nagari
- Operasional musyawarah nagari
- Operasional perencanaan pembangunan nagari
- Operasional pendataan asset nagari

3.2.2. Bidang pelaksanaan pembangunan

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kesehatan
- Perawatan Jalan nagari
- Perawatan Gedung
- Pengadaan Taman Dasawisma
- Pembangunan Jalan Nagari
- Pembangunan tugu batas nagari
- Pembangunan WC untuk masyarakat miskin
- Pembangunan bantuan RTLH untuk masyarakat miskin
- Penguatan modal Bum nag

3.2.3. Bidang pembinaan masyarakat

- Operasional LPMN
- Kegiatan Kontribusi lembaga adat
- Kegiatan pembinaan dan operasional pemuda
- Kegiatan operasional PHBN
- Kegiatan Operasional PHBI
- Kegiatan Operasional TP PKK Nagari
- Kegiatan liga desa

- Majelis Taqlim

3.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

- Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- Pelatihan Bamus Nagari
- Pelatihan SIPADES
- Pelatihan Operator Siskeudes
- Pelatihan LPMN
- Pelatihan KPMN
- Pelatihan PKK
- Pelatihan menjahit
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan kader-kader
- Pelatihan Tabulapot
- Pelatihan lembaga adat nagari
- Pelatihan pemuda
- Pelatihan Kelompok Tani
- Kegiatan wirid remaja
- Kegiatan pelatihan dan Pengadaan alat TTG Biogas
- Honor kader-kader
- Pelatihan TP-PKK Nagari
- Pelatihan Guru TPA/TPSA
- Pelatihan Pengurus Bumrag
- Pelatihan Pengurus Posyantek
- Pengadaan bibit tanaman unggul
- Kegiatan gotong royong masyarakat
- Penambahan makanan dan susu untuk balita dan lansia

3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

- Penanggulangan bencana
- Keadaan darurat
- Keadaan mendesak

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- Banjir
- Gempa
- Kebakaran

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Masalah tersebut memiliki :

- Minimnya Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari
- Banyaknya Jalan yang rusak menghambat aktifitas masyarakat
- Minimnya Peningkatan Kapasitas Bamus
- Mininya Gedung Belajar Agama dan Adat istidat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM / PEMBANGUNAN NAGARI

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, Prndayagunaan sumberdaya alam, pelestarianadat istiadat dan sosial budaya nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari. Adapun kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran nagari, kewenangan nagari dan secara teknis dilapangan nagari mempunyai sumber daya.

Tabel 1.5
RKP Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun anggaran 2020

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1.	Penghasilan tetap Wali Nagari	Lalang Panjang	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Wali nagari	1 Tahun	30,000,000	ADD	√			2020
		2.	Tunjangan Wali Nagari	Lalang Panjang	12 Bulan	Perangkat Wali Nagari / meningkatkan kesejahteraan perangkat	1 Tahun	15,600,000	ADD	√			2020
		3.	Penghasilan tetap Perangkat	Lalang Panjang	12 Bulan	Perangkat Wali Nagari / meningkatkan kesejahteraan perangkat	1 Tahun	220,800,000	ADD	√			2020
		4	Tunjangan Perangkat	Lalang Panjang	12 Bulan	Perangkat Wali Nagari / meningkatkan kesejahteraan perangkat	1 Tahun	63,600,000	ADD	√			2020
		5	Tunjangan Kehormatan Bamus	Lalang Panjang	12 Bulan	Bamus Nagari /peningkatan kesejahteraan Bamus	1 Tahun	67,200,000	ADD	√			2020
		6	Tunjangan program JKKK Perangkat dan Wali Nagari	Lalang Panjang	12 Bulan	Perangkat Wali Nagari	1 Tahun	13,470,000	ADD	√			2020
		7	Operasional Perkantoran	Lalang Panjang	12 Bulan	Perangkat Wali Nagari / penunjang berlangsungnya pemerintahan Nagari	1 Tahun	42,000,000	ADD	√			2020
		8	Operasional BAMUS Nagari	Lalang Panjang	12 Bulan	Bamus Nagari / Peningkatan fungsi pengawasan	1 Tahun	15,000,000	ADD	√			2020
		9	Operasional Pemungutan PBB	Lalang Panjang	12 Bulan	Masyarakat Nagari / Peningkatan kesejahteraan kolektor pajak	1 Tahun	2,800,000	ADD	√			2020
		10	Validasi Profil Nagari	Lalang Panjang	1 x 12 Bulan	Nagari /pemvalidatan data setiap tahun	1 Tahun	4,000,000	ADD	√			2020
		11	Musyawarah Nagari	Lalang Panjang	2 Kali	Nagari / perumusan dokumen RKP pertahun	1 Tahun	3,000,000	ADD	√			2020
		12	Musrenbang Nagari	Lalang Panjang	1 Kali	Nagari / penetapan kegiatan pembangunan pertahun	1 Tahun	3,000,000	ADD	√			2020
		13	Rapat Tim Penyusun RKP	Lalang Panjang	3 Kali	Nagari / Penyusunan prioritas kegiatan nagari pertahun	1 Tahun	3,500,000	ADD	√			2020

		14	Kegiatan Verifikasi	Lalang Panjang	1 Kali	Nagari / pemeriksaan kelayakan kegiatan pembangunan nagari	1 Tahun	3,000,000	ADD	√			2020
		15	Perlengkapan kantor wali	Lalang Panjang	1 kali	Nagari / Memaksimalkan sarana dan prasarana kantor wali	1 tahun	12,000,000	ADD	√			2020
		16	Pemeliharaan dan Perawatan kantor wali	Lalang Panjang	1 Unit	Nagari / menjaga kebersihan dan kelayakan kantor wali	1 tahun	9,000,000	ADD	√			2020
			Terselenggaranya Informasi Nagari	Lalang Panjang	1 Paket	Pemerintahan Nagari/ Masyarakat	1 Tahun	3,070,000	DD	√			2020
			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Lalang Panjang	1 Paket	Pemerintahan Nagari/ Masyarakat	1 tahun	1,800,000	DD	√			2020
			Penyusunan RKP Nagari	Lalang Panjang	1 Paket	Pemerintahan Nagari/ Masyarakat	1tahun	4,055,000	DD	√			2020
			penyelenggaraan Desa Sehat	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari/masyarakat	1tahun	300,000,000	DD	√			2020
			Jumlah Perbidang					816,895,000					

Pakan Salasa, 05 Mei 2020

Wali Nagari



LINDA SRININGSIH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan		Volume			Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antardesa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Bidang Pembangunan Nagari	1	Pemeliharaan Gedung MDA	Lalang Panjang	1 Unit	Masyarakat/ peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat	1 Tahun	13,480,000	DD	√			2020
		3	Rabat Beton jalan Panti Denbang	Lalang Panjang	500 m	Meningkatkan serta meancarkan ekonomi masyarakat	1 Tahun	250,000,000	DD	√			2020
		5	Perawatan Jalan Nagari	Lalang Panjang	3 km	Masyarakat / peningkatan ekonomi berdasarkan	1 Tahun	8,000,000	DD	√			2020

Nagari Lalang Panjang Inderapura

					kearifan lokal							
		1 2	Mobiler SD N 04	Lalang Panjang	4 Unit	Peserta didik / keadaan sekolah nyaman dan kondusif	1 Tahun	35,000,000	APBD. Prov	√		2020
		1 8	Penamba han Kelas SD N 04	Lalang Panjang	4 unit	Masyarakat Nagari	1 Tahun	250,000,000	APBD. Prov	√		2020
		2 0	Pembang unan Gapura	Lalang Panjang	2 Unit	Masyarakat/ Pengetahuan tentang Batas wilayah	1 Tahun	100,000,000	APBD. Kab	v		2020
		2 3	Kegiatan BBGRM	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari / kegiatan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong	1 Tahun	6,000,000	DD	√		2020
			Peningka tan Jalan Usaha Tani	Lalang Panjang	Masyarakat/		1 Tahun	206,600,000	DD	√		2020
			Jumlah Perbidan g					869,080,009				

Pakan Salasa, 05 Mei 2020
Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH

N o	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volum e	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksa na Kegiata n
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	K e r j a s a m a A n t a r D e s a	Kerja sama Pihak Ketig a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Bidang Pembinaa n Kemasyar akatan	1	Operasio nal PKK	Lalang Panjang	12 Bulan	Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat nagari	1 Tahun	10,000,000	ADD	√			2020
		2	Operasio nal Satlinmas dan Pelatihan Satlinmas	Lalang Panjang	12 Bulan	Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat nagari	1 Tahun	9,500,000	DD	√			2020
		3	Kegiatan pembinaa n BKB	Lalang Panjang	1 x 12 Bulan	Masyarakat / memaksimalkan kegiatan BKB	1 Tahun	2,500,000	ADD/DD	√			2020
		6	Kegiatan Liga Desa	Lalang Panjang	1 x 12 Bulan	Masyarakat / pemuda dan nagari	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2020
		9	Operasio nal LPMN	Lalang Panjang	1 X 12 Bulan	Masyarakat Nagari / perencanaan pembangunan oleh masyarakat untuk masyarakat	1 Tahun	2,500,000	ADD	√			2020
		10	Bantuan operasion al KAN	Lalang Panjang	1 x 12 Bulan	Todat / peningkatan perlengkapan sarana dan prasarana KAN	1 Tahun	2,500,000	ADD	√			2020
		12	Kegiatan PHBN	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari / berpartisipasi aktif dalam kegiatan PHBI	1 Tahun	3,000,000	ADD	√			2020
		13	Kegiatan PHBI	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari / Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PHBI	1 Tahun	3,000,000	ADD	√			2020
			Jumlah Perbidan g					43,000,009					

Pakan Salasa, 05 Mei 2020
Wali Nagari Lalang Panjang
Inderapura



LINDA SRININGSIH

N o	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volum e	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksa na
--------	------------------------	--	--	--------	------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

Nagari Lalang Panjang Inderapura

												Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Bidang Pemberdayaan ke Masyarakat.	1	Pondok Alquran	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari / masyarakat Dan anak Nagari	1 Tahun	1,200,000	DD	√			2020
		5	Bimtek Kader Desawisma	Lalang Panjang	125 Org	Masyarakat dan Nagari	1 Tahun	2,800,000	DD	√			2020
		6	PMT Ibu Hamil	Lalang Panjang	200 kotak	Perbaikan gizi dan untuk pencegahan Stunting	1 Tahun	18,000,000	DD	v			2020
		14	Beasiswa RTM	Lalang Panjang	50 murid	Siswa siswi RTM/ membantu biaya pendidikan siswa siswi RTM	1 Tahun	30,000,000	DD	√			2020
		18	Jambore PKK	Lalang Panjang	1 Paket	Nagari/ PKK	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2020
		25	Honor Guru PAud dan TK	Lalang Panjang	12 Bulan	Meningkatkan kesejahteraan Guru	1 Tahun	28,800,000	DD	v			2020
		26	Honor Guru TPQ	Lalang Panjang	12 Bulan	Meningkatkan Kesejahteraan Pengajar	1 Tahun	38,400,000	DD	v			2020
			Jumlah Perbidang					129,200,009					

Pakan Salasa, 05 Mei 2020
Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH

N O	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volum e	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksa na Kegiata n
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	K e r j a s a m a A n t a r D e s a	Kerja sama Pihak Ketig a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA TAK TERDUG A	1	Keadaan Mendesa k-desak	Lalang Panjang	1 Paket	Meningkatkan nilai nilai sosial terhadap masyarakat	1 Tahun	60,000,000	ADD/DD	V			2020
		2	Kejadian luar Biasa	Lalang Panjang	1 paket	kejadian luar biasa yang dihadapi masyarakat	1 Tahun	297,000,000	ADD/DD	V			2020
			TOTAL PERBIDA NG					357,000,009					

Pakan Salasa, 05 Mei 2020
Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH

4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat nagari Lalang Panjang Inderapura tetapi pemerintah nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi , baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi peserta nagari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Lalang Panjang Inderapura

Pada Tanggal : 05 Mei 2020

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH